



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 936/I/XII/2016

**Semua Fraksi Setuju
Pergantian Ketua DPR RI**

**Akom Nyatakan
Ikhlas Diganti**

**Sidang Parlemen Asia ke-9
di Siam Reap Kamboja
Resmi Dibuka**



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Pimpinan DPR RI

Semua Fraksi Setuju Pergantian Ketua DPR RI

Sepuluh fraksi di DPR RI akhirnya menyepakati pergantian pucuk Pimpinan DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto.

Semua fraksi memandang, pergantian kursi Ketua DPR merupakan hak prerogatif Fraksi dan Partai Golkar. Setya Novanto pun dilantik secara resmi sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin.

Tanpa dihujani interupsi, satu per satu fraksi menyampaikan pandangan yang hampir senada. Dimulai dari F-PDI Perjuangan dan terakhir F-Hanura. Keputusan F-PG harus dihormati. Dan pergantian ini pun sudah sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, tidak hadir dalam Rapat Paripurna ke-14 tersebut yang salah satu

agendanya melantik Ketua DPR yang baru.

Disaksikan empat Wakil Ketua dan para anggota DPR RI yang hadir, Setya Novanto dilantik oleh Pelaksana Harian MA, Rabu sore (30/11). Semua fraksi berharap, DPR di bawah kepemimpinan Setnov bisa terus meningkatkan kinerjanya. Menyerap aspirasi rakyat juga tugas yang harus ditingkatkan. Dan revisi UU MD3 kembali mengemuka di tengah agenda pergantian Ketua DPR tersebut.

Ario Bimo dari F-PDI Perjuangan saat menjadi juru bicara di rapat tersebut, mengatakan, revisi UU MD3 harus selesai sebelum Pemilu. Fraksinya menayangkan UU MD3 yang lalu dibahas dan disahkan

setelah Pemilu usai. Sementara soal pergantian kursi Ketua, itu merupakan hak prerogatif F-PG yang tidak bisa diintervensi fraksi lain. Sementara Aziz Syamsuddin sebagai juru bicara F-PG hanya menyampaikan pergantian ini dikembalikan pada UU MD3.

Yang menarik ketika juru bicara F-Gerindra Supratman, menyampaikan, agar pergantian ini yang terakhir. Tak ada lagi pergantian setelah ini. Saatnya menghentikan pertikaian dan saatnya pula menyejahterakan rakyat. Supriyadin juru bicara F-Nasdem, mengatakan, pergantian ini merupakan dinamika yang terjadi di tubuh Fraksi dan Partai Golkar. ■

(mb), foto : jukabr

Fadli Zon Beri Ucapan Duka Cita atas Wafatnya Fidel Castro

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan ucapan duka kepada rakyat dan pemerintah Kuba atas wafatnya Fidel Castro pada Jumat, 25 November 2016. Fadli menjelaskan bahwa Fidel Castro adalah salah satu pemimpin besar dunia ketiga yang memiliki pengaruh tidak kecil dalam sejarah politik dunia. Oleh karenanya, wafatnya Fidel Castro adalah sebuah kehilangan besar.

“Castro adalah salah satu pemimpin besar Dunia Ketiga. Pengaruhnya tidak kecil bagi sejarah politik dunia. Sehingga, meninggalnya Castro tentu merupakan sebuah kehilangan besar, bukan hanya bagi Kuba, tapi juga bagi masyarakat Dunia Ketiga secara umum,” ujar Fadli pada Senin, (28/11) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Bagi Fadli, Indonesia dan Kuba memiliki hubungan yang sangat dekat. Sesudah Revolusi Kuba 1959, Indonesia termasuk negara pertama yang segera membuka hubungan diplomatik dengan Kuba. Bahkan, Presiden Soekarno merupakan kepala negara asing pertama yang mengunjungi Kuba sesudah berhasilnya penggulingan rezim Batista oleh gerakan revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro, Che Guevara, dan Raul Castro, yang kini menjadi Presiden Kuba. "Jadi, hubungan kita dengan Castro dan Kuba sangat dekat," jelas Fadli.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, Kuba sangat menghormati Indonesia yang tidak lepas dari kepeloporan Indonesia dalam menggalang solidaritas negara dunia ketiga melalui Konferensi Asia Afrika. "Di bawah Castro, Kuba memang sangat menghormati Indonesia. Hal itu tidak lepas dari kepeloporan



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon

Indonesia dalam menggalang solidaritas negara-negara Dunia Ketiga melalui Konferensi Asia Afrika, yang berhasil menjahit negara-negara berkembang agar tidak terkooptasi oleh dua blok besar yang bertarung pada masa Perang Dingin," jelasnya.

Sebagai negara komunis, Kuba tidak segan memberikan pembelaan terhadap Palestina dan konsisten terhadap intervensi barat terhadap negara dunia ketiga. Bagi Fadli, sikap berani ini layak dicontoh bagi pemimpin negara berkembang lainnya. "Meski merupakan pemimpin negara komunis, Castro tak

segun memberikan pembelaan terhadap Palestina, serta konsisten mengancam serta melawan segala bentuk intervensi Barat terhadap negara-negara Dunia Ketiga. Sikap berani yang layak dicontoh oleh pemimpin-pemimpin negara berkembang lainnya," tutur Fadli.

"Sebagai pemimpin, Castro berhasil memajukan Kuba, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Bahkan, kebijakan pendidikan dan kesehatan Kuba kini diakui

merupakan salah satu yang termaju di dunia. Melalui kebijakan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis, Kuba saat ini memiliki tingkat literasi dan angka harapan hidup yang tinggi," sambung Fadli.

Sebagaimana diketahui, Hubungan dekat Indonesia dengan Castro dan Kuba di antaranya pernah diwakili oleh penerbitan seri perangko bergambar Soekarno, Fidel Castro dan Che Guevara pada 2008, serta penerbitan perangko 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kuba pada 2010. ■

(b.m.p), Foto: Andri/br

BULETIN
PARLEMENTARIA



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virginne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpri.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Muriyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) | ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN |

Akom Nyatakan Ikhlas Diganti

Ade Komarudin yang akrab disapa Akom, menyatakan ikhlas posisinya sebagai Ketua DPR RI diganti. Sebagai politisi, ia juga menyatakan taat hukum dan organisasi. Keikhlasannya melepas kursi Ketua DPR RI demi menjaga keutuhan NKRI.

Demikian penegasan Akom dalam jumpa pers di DPR RI Senin malam (28/11). Didampingi Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah, Akom mengatakan, jabatan ini amanah yang suatu saat bisa diambil kembali. Semua Pimpinan DPR RI sendiri, ungkap Akom, sudah membaca dan menelaah surat usulan pergantian posisi Ketua DPR RI dari DPP Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar.

"Tentang pergantian ini, saya berpegang teguh pada prinsip bahwa jabatan adalah amanah yang datang dari Allah SWT. Bagi saya, jabatan hanyalah sebuah cara untuk memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara ini. Karenanya, kapanpun Allah akan memberikan ataupun mengambil amanah ini, saya siap dan ikhlas," akunya.

Menyikapi surat dari partainya



Ade Komarudin didampingi tiga Wakil Ketua DPR RI saat jumpa pers

yang ingin mengganti posisinya sebagai Ketua DPR RI, Akom sekali lagi menegaskan, ia sangat taat pada semua peraturan yang berlaku, termasuk peraturan di internal partainya sendiri. "Sebagai kader, saya ingin menempatkan keutuhan negara, partai, di atas kepentingan pribadi. Mudah-

mudahan apa yang saya lakukan selama ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi institusi DPR RI dan Republik ini."

Surat usulan pergantian tersebut, lanjut Akom, segera diproses secepatnya sesuai peraturan perundangan. Dan Akom sendiri mengungkapkan, ia sudah berkonsultasi dengan para tokoh politik di partainya, tokoh agama, dan para aktivis HMI menyangkut suksesi kursi Ketua DPR RI tersebut.

"Saya sendiri sudah siap untuk menerima apapun yang terjadi pada diri saya. Saya akan tetap memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini, dalam kapasitas apapun. Saya ikhlas menjalani amanah apapun yang Allah berikan, termasuk apa yang harus saya jalani saat ini, tutup Akom. ■

(mb) foto: andri/or

Ade Komarudin Diberhentikan dari Ketua DPR RI

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan Ade Komarudin diberhentikan dari jabatan Ketua DPR RI. Ade diberhentikan dari jabatan Ketua DPR RI karena mendapat sanksi sedang dari MKD terkait perilaku etik seorang Anggota Dewan.

Putusan MKD dibacakan langsung oleh Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad di ruang sidang lembaga etik Anggota Dewan. "Diputuskan terhitung sejak hari Rabu tanggal 30 November 2016, yang terhormat saudara Ade Komarudin anggota Fraksi Golkar dinyatakan berhenti dari jabatan Ketua DPR RI masa keanggotaan tahun 2014-2019," kata Dasco, Rabu (30/11).

Politikus partai Gerindra itu

menjelaskan, diberhengkannya Akom dari posisinya saat ini karena dua perkara, pertama dalam perkara nomor register 62 yang dilaporkan oleh 36 anggota Komisi VI karena Akom menyetujui rapat sembilan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Komisi XI tanpa sepengetahuan Komisi VI selaku mitra kerja perusahaan tersebut.

Dari kasus itu telah diputuskan bahwa terdapat pelanggaran yang

dilakukan Akom dengan kriteria ringan dan diberi sanksi teguran tertulis.

Lebih lanjut, kata Dasco, MKD juga memutuskan untuk perkara nomor register 66 yang dilaporkan anggota DPR RI yang ada di Badan Legislasi terhadap saudara Ade Komarudin. MKD pun memutuskan terdapat pelanggaran kode etik DPR RI dengan kriteria sedang terhadap Ade Komarudin.

"Putusan ini ditetapkan dalam



Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad

rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 dalam rapat bersifat tertutup yang dihadiri oleh Pimpinan dan anggota MKD dan dibacakan dalam sidang MKD pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 serta menghasilkan keputusan final," ungkap Dasco.

Dasco menuturkan, keputusan

terhadap Akom itu berdasarkan Pasal 21 huruf b peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI. Saat membacakan putusan terhadap Ade Komarudin, Dasco didampingi Wakil Ketua MKD Sarifudin Sudding dan Maman Imanulhaq. ■

(rmm.np) Foto: Krensia/hr

Fadli Zon Kukuhkan PP SNKI di Madura

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon dalam kunjungannya ke Kabupaten Sumenep, Jawa Timur telah mengukuhkan Pengurus Pusat Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI) periode 2016-2021 pada Jumat, (25/11). Sebagaimana diketahui, Fadli Zon adalah Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI)

A cara pengukuhan dilakukan di Desa Aeng Tong Tong, Kecamatan Saronggi, Sumenep, Madura. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Hadi Sutarto, Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Sumenep Arlandi Priyogo, Dandim Letkol Inf. Budi Santosa, serta Wakapolres Sumenep Kopol Sutarno. Pengukuhan PP SNKI ini turut dihadiri juga oleh

Sumenep juga tersohor karena garapnya yang bagus," kata Fadli Zon.

Lebih jauh Politisi Gerindra ini

11 tahun. Untuk itu, kami berharap para perajin keris di Sumenep dan di seluruh Nusantara tidak berhenti untuk terus berkarya," ujar Fadli Zon.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon foto bersama Pengurus Pusat SNKI

Dalam acara tersebut, Fadli Zon juga menandatangani Sampul Peringatan Pengukuhan Pengurus Pusat Serikat Nasional Keris Indonesia (SNKI). Sebelum menutup acara, Fadli Zon juga berpesan kepada pemerintah pusat dan Pemkab

Anggota Komisi V Nizar Zahro.

Dalam sambutannya, Fadli Zon menjelaskan alasannya memilih Desa Aeng Tong Tong, Sumenep sebagai tempat pengukuhan pengurus pusat SNKI. "Hari ini bertepatan dengan tanggal 25 November dimana keris mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai warisan agung budaya dunia. Kami memilih Sumenep sebagai tempat pengukuhan Pengurus Pusat SNKI, ini sebagai penghormatan sekaligus apresiasi karena Sumenep merupakan daerah pengrajin dan empu keris terbanyak di Indonesia dan dunia. Keris-keris

menjelaskan bahwa selaku Ketua Umum SNKI, dirinya memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh warga Desa Aeng Tong Tong dan juga para Empu dan pengrajin serta pelaku usaha perkerisan yang telah hadir dalam acara tersebut.

Melalui SNKI, Fadli Zon ingin budaya keris terus dikembangkan dan dilestarikan agar warisan agung budaya dunia ini tetap lestari, khususnya di Madura. "Sejak tahun 2005, keris mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan agung budaya dunia hingga sekarang sudah

Sumenep memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada para perajin keris sebagai bagian dari menjaga kelestarian karya adiluhung warisan kemanusiaan.

"Salah satu langkah konkrit Pemerintah membantu melestarikan keris adalah dengan menjadikan keris sebagai cinderamata resmi kenegaraan. Saya dalam berbagai kunjungan ke berbagai negara ataupun pertemuan dengan Duta Besar, selalu memberikan Keris sebagai cinderamata. Ini langkah konkrit mengenalkan Keris ke kancah Internasional," tutup Fadli Zon. ■

(hs.np)

Tak Boleh Ada Diskriminasi dalam Hukum

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menyerukan kepada Kepolisian RI agar tak menerapkan *double standard* dan diskriminasi dalam menegakkan hukum. Kritik ini disampaikan Fadli menanggapi kasus dugaan penghinaan kepada kepala negara yang dilakukan musisi Ahmad Dhani.

Fadli menegaskan hal tersebut kepada pers di ruang kerjanya, Senin (28/11), saat menerima Ahmad Dhani. Bersama Dhani, ia menggelar konferensi pers untuk menanggapi dugaan penghinaan kepala negara yang dialamatkan Polda kepada Dhani. "Apa yang disampaikan dalam orasi mas Ahmad Dhani tidak ada apa-apanya. Tidak ada penghinaan. Dan Polisi jangan gunakan pasal karet. Ini bukan zamannya lagi," tegas Fadli.

Seperti diketahui, orasi Dhani yang diduga berisi penghinaan terhadap kepala negara itu terjadi di depan Istana Negara dalam aksi demonstrasi 4 November lalu. Dhani sendiri di hadapan pers dan Fadli, mengatakan, pemanggilan dirinya oleh Polda Metro penuh kejanggalan. Pasalnya, dalam surat itu tidak



Konferensi pers Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon bersama Ahmad Dani

disebut siapa terlapornya. Dan surat panggilan sebagai saksi, kata Dhani, biasanya tidak mencatumkan nomor surat perintah penyidikan (*sprindik*).

Pasal 207 KUHP yang dituduhkan, lanjut Dhani, sangat tidak wajar. Dhani sendiri sudah mendengar kesaksian ahli

pidana yang sudah dipanggil Polda untuk kasusnya itu. Tanpa menyebut nama ahli pidananya, ungkap Dhani, tak ada unsur pidana sama sekali. Namun, pandangan ahli pidana itu kemungkinan diabaikan polisi. Dhani menilai, dirinya mungkin dijadikan target tersangka.

"Saya khawatir polisi akan mengkriminalisasi saya. Dan ini buruk bagi penegakan hukum," ucap Dhani. Sementara Fadli juga kembali menyatakan, Polri begitu mudah

mengkriminalisasi seseorang. Padahal, banyak kasus yang dulu pernah ia adukan, hingga kini belum ditindaklanjuti. "Penegakan hukum harus *fair*. Jangan sampai ada kepentingan apa pun. Kritik tidak boleh dinilai sebagai penghinaan," imbuh Fadli. ■

(samb), Foto: Rumi/br

BURT DPR RI Apresiasi Standar Pelayanan RS Eka Hospital Pekanbaru

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hasrul Azwar mengapresiasi standar pelayanan yang diterapkan RS Eka Hospital Pekanbaru sebagai RS *Provider* bekerja sama dengan Jasindo terkait layanan kesehatan bagi Anggota DPR RI di wilayah Provinsi Riau, Kamis (24/11).

Hasrul menambahkan bahwa jaminan layanan kesehatan anggota DPR RI diatur dalam Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2014 tentang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Pejabat Negara, termasuk didalamnya seluruh anggota DPR RI. Oleh karenanya Tim Kunspek BURT DPR RI perlu melihat langsung kelengkapan fasilitas yang dimiliki RS Eka Hospital serta standar pelayanan yang selama ini diterapkan.

"Saya berharap pola administrasi rumah sakit yang bertele-tele pada umumnya sehingga mengabaikan keselamatan pasien tidak terjadi di Rumah Sakit ini," tegas Hasrul.

Politisi asal partai berlambang Ka'bah ini menekankan pentingnya standar pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien yaitu Anggota DPR RI dan keluarganya, tanpa diperlambat dengan pola administrasi yang ruwet.

"Saya apresiasi sistem *database* yang

sudah dibangun RS Eka Hospital Pekanbaru sehingga memudahkan proses administrasi dan mengetahui riwayat kesehatan pasien yang pernah ditangani sebelumnya, hal semacam ini harus diterapkan di RS yang lain juga," imbuh Hasrul.

Di sisi lain Hasrul juga mendorong Jasindo yang dipercaya mengelola jaminan kesehatan para Anggota DPR RI agar bekerja sama dengan RS Eka Hospital Pekanbaru sebagai RS *Provider*



Tim Kunspek BURT DPR RI meninjau RS Eka Hospital di Pekanbaru

(penyedia layanan) secara komprehensif agar standar pelayanan sesuai dengan harapan semua pihak.

"RS *Provider* harus memiliki semua daftar nama Anggota DPR RI dari Dapil di mana RS tersebut berada. Termasuk nama anggota keluarganya. Ini untuk memudahkan dan mempercepat proses pelayanan pasien," pungkas Hasrul.

Menjawab berbagai pertanyaan Tim Kunspek

BURT DPR RI, Direktur Utama RS Eka Hospital dr Suryanto menjelaskan bahwa Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru yang berdiri sejak tahun 2008 ini sudah memiliki *database* Anggota DPR RI dan keluarganya.

"Kami juga mengutamakan pelayanan pasien gawat darurat tanpa memperlambat dengan proses administratif," jelas Suryanto.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua Hazrul Azwar (PPP), didampingi Agung Budi Santoso (Wakil Ketua/Demokrat), Rendy Lamadjido (PDI-P), Refrizal (PKS), dan Jamaluddin Jafar (PAN). ■

(epi) Foto: Naefurrijal

RUU CSR Wajib Atau Sukarela

Komisi VIII DPR RI menerima masukan dari Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. DR. Nindyo Pramono, SH. MS. terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Terjadi tanya jawab kedua arah yang dinamis antara Anggota Komisi VIII yang dipimpin Wakil Ketua Iskan Qolba Lubis dengan pakar hukum tersebut, mengenai pengaturan mekanisme perusahaan melaksanakan CSR dengan *Voluntary* (sukarela) atau merupakan *Mandatory* (kewajiban).

Nindyo Pramono mengatakan pertama bahwa CSR mempunyai sifat dasar sukarela. Kalau kita (Indonesia) mengacu kepada filosofi Negara yang berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945, bahwa nilai moral sebagai dasar perilaku bisnis itu diakui di dalam sistem kenegaraan kita.

Namun, jika hal yang bersifat sukarela akan digeser menjadi sesuatu yang menjadi kewajiban, menurutnya itu juga tidak salah dan tidak bertentangan. Sekalipun kalau ingin digeser menjadi suatu yang menjadi kewajiban menurut pandangannya menyarankan Pemerintah tidak perlu mengatur kewajiban pelaksanaan CSR sedemikian mendalam dalam bentuk baku.

"Pikiran saya biarkan korporasi diberikan ruang untuk menterjemahkan kewajiban tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi dari perusahaan dan masyarakat lingkungannya," katanya, Kamis (24/11), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dia tidak setuju dengan perusahaan atau korporasi tidak yang melakukan CSR, maka serta merta muncul sanksi-sanksi hukum maupun administrasi.

Menurut Iskan Qolba Lubis, ada dua pandangan yang berkembang di masyarakat, yang pertama RUU CSR ini sifatnya wajib supaya perusahaan yang belum disiplin mengeluarkan dana CSR bisa lebih ditekankan lagi.

Iskan memandang pakar hukum UGM ini lebih condong mengambil jalan tengah, yaitu negara perlu ikut berperan, tetapi jangan terlalu dalam

dengan diberikan kebebasan perusahaan untuk mengelola dana CSR, karena CSR sifatnya sukarela.

Tujuan RUU ini dibentuknya prinsipnya perusahaan-perusahaan mendapatkan manfaat keuntungan yang sangat besar dari negara ini. Tetapi masyarakat di sekitar tidak merasakan manfaat dengan keberadaan perusahaan tersebut.

Kemudian, Iskan membenarkan bahwa perusahaan telah dikenakan penarikan retribusi melalui sistem perpajakan yang dikumpulkan dari seluruh negeri ke Pusat yang kemudian berbentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun bisa saja terjadi daerah di sekitar perusahaan itu tidak tersentuh anggaran negara.

"Kita mau melihat dana CSR itu dapat menutupi sistem menyalurkan APBN, akan membantu negara pula dalam menuntaskan kemiskinan," tegasnya.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa, menambahkan harus ada etika bisnis yang baik, sehingga perlu dipikirkan mekanisme kontrol, yang pada akhirnya mereka (perusahaan atau korporasi) mau menjalankan CSR. ■

(asi) Foto: Jakarta



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis

BURT DPR RI Akan Perjuangkan TVR Parlemen

"Selama ini TV Penyiaran publik hanya TVRI, lainnya adalah TV swasta. Jadi bisa dikatakan TV Parlemen ini 'kelaminnya' tidak jelas. Padahal, TV Parlemen ada untuk menyiarkan kepada publik tentang apa saja yang dikerjakan oleh DPR RI. Karena sebagai lembaga Negara, DPR RI butuh kepercayaan publik. Dan untuk bisa dipercaya, maka masyarakat harus tahu apa yang sedang dikerjakan DPR RI. TVR Parlemen, termasuk Majalah dan buletin Parlementaria dan media sosial lah yang bertugas untuk menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat," ujar Agung.

Sayang, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, undang-undang penyiaran telah menetapkan bahwa TV Penyiaran publik hanya TVRI, maka akan sulit bagi TV Parlemen untuk menjadi TV Penyiaran publik. Namun dengan masuknya era digital, dimana pemerintah telah mencanangkan pada tahun 2018 mendatang, seluruh penyiaran akan menggunakan digital, dan tidak lagi hanya mengandalkan analog. Kondisi ini memungkinkan harapan TVR Parlemen menjadi tv publik.

Sementara itu Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Djaka Dwi Winarko mengatakan bahwa dalam rangka mendukung kinerja dewan, pihaknya akan menggunakan seluruh *platform* yang ada dalam biro pemberitaan Parlemen untuk menyiarkan dan menginformasikan kepada publik tentang kinerja DPR RI. Seluruh *platform* yang dimaksud itu adalah TV dan Radio Parlemen, Majalah dan Buletin Parlementaria serta Media *social* DPR RI.

"Biro Pemberitaan Parlemen dalam rangka mendukung kinerja dewan akan selalu mengintegrasikan seluruh media-media yang ada baik media external dan internal, dan akan menggunakan seluruh *platform* untuk menyiarkan kepada publik tentang tugas dan fungsi yang tengah dikerjakan dewan," papar Djaka.

Budiman, peneliti dari Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI bidang komunikasi menjelaskan bahwa undang-undang penyiaran baik tahun 1997, maupun Undang-undang penyiaran tahun



Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso didampingi sejumlah pejabat Setjen DPR RI dalam acara press gathering TV Parlemen

2002 hanya melihat penyiaran dari teknologi analog saja. Kondisi ini tidak bisa mengimbangi tuntutan industri penyiaran terkait permintaan penyaluran program siar. Tidak kurang 300 lembaga penyiaran meminta penyaluran program siar. Sementara jumlah frekuensi di sistem

analog sangat terbatas, bahkan saat ini telah habis digunakan oleh tv lainnya yang telah lebih dulu ada. Sedangkan sistem penyiaran berbasis digital lebih efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi. Setiap frekuensi memungkinkan diisi oleh banyak stasiun tv dan radio. Kondisi ini dapat digunakan oleh lembaga penyiaran baru untuk menyalurkan berbagai program siarnya, termasuk TVR Parlemen. Pada rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Deputi Persidangan, Damayanti dan Kepala Bagian TVR Parlemen, Irfan itu tidak hanya membicarakan permasalahan teknik penyiaran TVR Parlemen, namun juga terkait dengan kesejahteraan para kru yang notabene merupakan pegawai dari TVR Parlemen sendiri. Maya, begitu Damayanti, biasa disapa, berjanji akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pegawai. ■

(Ayu), Foto: Rizka/bp

Perhatian Kepada Guru Dipertanyakan



Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana

Hari Guru Nasional (HGN) diperingati setiap tahunnya, dengan berbagai seremonial tertata mulai dari pusat sampai ke kabupaten kota. Namun, justru menjadi pertanyaan Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana. Menurutnya, apakah itu benar-benar perhatian kepada guru, atau hanya seremonial semata.

Komisi X Sayangkan Stadion Utama Palaran Tak Terawat

Komisi X DPR RI yang membidangi Pemuda dan Olahraga meninjau Stadion Utama Palaran atau Arena Eks PON 2008 setelah Tim Kunspek Komisi X usai memonitor Sekolah Khusus Olahragawan (SKOI), Samarinda, Jum'at (25/11).

Dalam peninjauan ke beberapa tempat olahraga di kompleks Stadion Utama Palaran, Samarinda, Tim Kunspek Komisi X melihat beberapa *venue* eks PON 2008 mengalami kerusakan dan tidak terawat.

Pimpinan Kunspek Komisi X, Sutan Adil Hendra mengatakan sangat menyayangkan stadion megah berskala internasional yang dibuat oleh Pemprov Kaltim sebagai *venue* pembukaan dan penutupan PON XVII Tahun 2008 yang lalu, kini tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan olahraga.

"Ini sangat-sangat disayangkan sekali stadion semegah ini kurang dimaksimalkan," jelasnya.

Padahal, di sini masih bisa dimanfaatkan untuk olahraga atletik, dan gedung serbaguna bisa untuk latihan gulat atau cabang olahraga lainnya.

Hasil temuan ini menjadi bahan masukan Komisi X dan nanti akan dibahas dalam rapat kerja antara Komisi X dengan kementerian terkait sehingga dapat menemukan solusi atas berbagai

permasalahan yang ada di Stadion Utama Palaran, Samarinda.

Kepala Dispora Kaltim, Fachruddin Djaprie mengakui kondisi *venue* kompleks Stadion Utama Palaran mengalami kerusakan. "Ini perlu segera dilakukan penanganan atau perbaikan, termasuk perbaikan jaringan listrik dan jaringan air serta jalan lingkungan," kata Fachruddin.

Menurutnya, Pemprov Kaltim telah menganggarkan biaya pemeliharaan kompleks Stadion Utama dan Madya dengan skala prioritas, tapi keterbatasan anggaran yang tersedia yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Kaltim, apalagi dengan terjadinya defisit anggaran saat ini yang dialami Pemprov Kaltim. "Kami mengusulkan agar pemeliharaan dan atau rehab *venue* yang ada di kompleks Stadion



Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau Stadion Utama Palaran di Samarinda

Utama ini dapat dianggarkan melalui APBN," usul Fachruddin.

Lebih jauh, Fachruddin mengatakan bahwa kendala pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga terutama di kompleks Stadion Utama Palaran dikarenakan lokasi Stadion Utama Palaran berada jauh dari pusat Kota Samarinda dan tidak adanya trayek transportasi umum seperti angkot yang melewati Stadion Utama Palaran. ■

(f/w), Foto: Iwani/br

“ Apa itu untuk memperlihatkan bahwa guru Indonesia banyak dan kompak? Atau untuk memperlihatkan bahwa guru Indonesia bahagia dan sejahtera? Atau malah untuk memperlihatkan bahwa guru Indonesia telah menempati posisi mulia dan dimuliakan di Indonesia? Hanya para gurulah yang dapat menjawabnya,” kata Meli, panggilan akrabnya, ketika dihubungi Parlemenaria, Jumat (25/11).

Politisi F-Gerindra melihat, ketika peringatan HGN, diucapkan banyak terimakasih dan puji-pujian terhadap jasa guru, hingga dicanangkannya berbagai program untuk memperkuat guru dan disandarkan berjuta harapan terhadap kinerja guru. Namun menurutnya, itu tak sejalan dengan apa yang sebenarnya

terjadi.

"Apakah kita sungguh-sungguh sudah berterimakasih kepada para guru? Apakah penganiayaan terhadap guru yang marak terjadi itu merupakan bagian dari cara kita berterimakasih kepada guru? Mari kita jawab pertanyaan ini dengan jujur," pinta Meli kepada seluruh rakyat Indonesia.

Meli menambahkan, berbagai program pemerintah telah dicanangkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Namun ia mempertanyakan, sejauh manakah program-program itu sudah meningkatkan kompetensi guru.

"Sudahkah kita mempunyai program jangka panjang yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh secara berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru?

Apakah harapan yang negara dan bangsa sandarkan pada guru telah setara dengan pemenuhan kewajiban negara terhadap guru? Pemerintahlah yang dapat menjawab permasalahan ini," kata Meli.

Politisi asal dapil Sumatera Selatan itu menambahkan, ketika banyak kompetensi keguruan belum tercapai, di satu sisi guru juga harus sadar dengan dirinya yang menjadi figur untuk dicontoh dan dipedomani oleh seluruh anak bangsa. Sehingga ia berharap guru dapat meningkatkan kinerja, tanpa terus menerus menghubungkannya dengan peningkatan pendapatan, demi melahirkan generasi penerus yang berkarakter, cerdas dan terkemuka. ■

(f/f) Foto: Kremabr

Komisi VI Dorong PT Semen Indonesia Rembang Segera Beroperasi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana dalam kunjungan kerja spesifik ke Rembang Sabtu, (26/11) berharap agar PT Semen Indonesia yang berada di Rembang, Jawa Tengah dapat segera beroperasi. Hal ini penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Rembang dan sekitarnya.

“Tadi sudah kita dengarkan mudah-mudahan BUMN Semen ini segera dapat beroperasi. Mudah-mudahan ini bisa segera terselesaikan, tidak hanya pendekatan hukum tetapi juga pendekatan yang lain,” tuturnya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan jajaran direksi PT Semen Indonesia.

Terkait dengan persoalan hukum yang telah diputuskan di Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan petani Rembang, Azam mengatakan seluruh aspek yang bisa ditempuh harus segera dilakukan. Mengingat, investasi sebesar 5 triliun ini harus dimanfaatkan dengan baik.

“Jadi harus simultan antara pendekatan hukum, ekonomi, politik dan seluruh aspek yang bisa ditempuh akan ditempuh sebab aset dan investasi 5 triliun ini bukan buatan. Tadi kita dengar paparan direksi bahwa banyak hal yang telah dilakukan terkait masalah sosial, karyawan, pengurangan kemiskinan, lapangan kerja. Itu sudah dilaporkan direksi, itu bagus dan perlu dikembangkan,” jelasnya.

Ia pun berharap investasi yang ada di Rembang ini harus segera terealisasi untuk

memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri. “Harusnya secepatnya. Investasi harus segera menghasilkan dan memenuhi kebutuhan *demand* dalam negeri. Sebab *share* Semen Indonesia sudah menurun dibanding lainnya yang swasta. Sehingga harus dinaikkan lagi,” jelas Azam.

Dia minta Menteri BUMN untuk bicara di rapat kabinet dimana ada menteri-menteri terkait bahwa ada industri yang siap jalan.

Sedangkan persoalan hukum yang terjadi di PT Semen Indonesia, Azam menjelaskan hal itu harus diselesaikan. “Harus segera diselesaikan. Kalau tidak, investasi yang sudah ditanam BUMN menjadi tidak bermanfaat,” ujarnya.

Politisi Demokrat ini akan berkoordinasi dengan fraksi-fraksi di DPR RI untuk mendesak presiden agar PT Semen Indonesia ini dapat segera beroperasi. “Melalui fraksi akan sampaikan, tentunya fraksi yang dekat dengan presiden seperti PDIP, Golkar. Dalam raker nanti



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana

kita akan undang dan sampaikan bahwa kita sudah melakukan kunjungan kesini dan sudah mendengar, melihat, mendapatkan informasi soal masalah lingkungan disini,” jelasnya.

Ikut serta dalam Tim Kunspek anggota Komisi VI DPR RI yakni Lili Asjudiredja, Bowo Sidik Pangarso dan Endang Srikarti Handayani (F-Golkar), Abdul Wahid dan Sjahrani Mataja (F-Gerindra), Yaqut Cholil Qoumas (F-PKB), Nur Hasan Zaidi (F-PKS), Mukhlisin (F-PPP) dan Slamet Junaedi (F-Nasdem). ■

(hs.mp), Foto: Hendra/br

Reklamasi Teluk Benoa Harus Dengarkan Pendapat Masyarakat

Komisi IV DPR RI menggelar RDPU dengan PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) dalam rangka pemaparan mengenai program dan rencana kerja reklamasi Teluk Benoa, Bali, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (28/11).

Sesuai surat yang dikirimkan oleh PT. TWBI kepada Komisi IV DPR RI, yakni perihal permohonan kepastian investasi dan kepastian hukum di wilayah Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan, yakni antara lain mengenai investasi yang telah ditanamkan dalam rangka perencanaan dan persiapan proyek reklamasi. Selain itu, adanya indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan



Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto

Para Gubernur dan Bupati Diminta Efektifkan Himpun Zakat

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang mengharapkan para gubernur dan bupati ikut berperan mengefektifkan penarikan zakat. Potensi zakat di Indonesia, sesuai ekspose Kepala Badan Amil Zakat Nasional Bambang Sudibyo per tahun bisa mencapai Rp 227 triliun.

“Potensi ini kalau dimaksimalkan bisa membantu anggaran pembangunan. Karena itu para Gubernur dan Bupati betul-betul bisa mengefektifkan potensi zakat ini,” katanya sesuai mengikuti pertemuan dengan Kakanwil Kemenag Sulsel beserta jajarannya Selasa (22/11) lalu di Makassar.

Dalam pertemuan Tim Panja Pendis Komisi VIII yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Iskan Qolba Lubis, pejabat Kemenag Kabupaten Maros melaporkan bahwa semua PNS muslim diwajibkan membayar zakat sehingga setiap bulannya bisa terkumpul Rp 24 juta. Diharapkan daerah lain menerapkan hal serupa sehingga dana dari zakat ini bisa dimaksimalkan setiap daerah.

Selain peran Gubernur dan Bupati, Samsu Niang berharap untuk memaksimalkan penerimaan zakat, maka sumber daya manusia (SDM) harus dipersiapkan dengan memadai. “Minimal ketua amil zakat propinsi/kabupaten ada profesi perbankannya, sehingga

pengelolaan zakat bisa lebih baik dan terarah ke depan,” tandasnya.

Terkait dukungan regulasi, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, sekarang ini baru melakukan perbaikan terhadap regulasi Badan Amil Zakat Nasional. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada aturan yang paten untuk pengelolaan amil dan zakat. Kalau ini tercapai lanjut dia, jumlahnya signifikan membantu APBN.

“Apalagi Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, kalau konsisten berzakat bisa tercapai jumlah itu. Karena itu pengelolaannya harus maksimal,” jelas Syamsu.

Disamping itu, kata politisi PDI Perjuangan ini, kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat ini belum maksimal. Pengelola dana ini adalah instansi plat merah, mestinya badan pengelola amil zakat ini betul-betul independen supaya

oleh pihak ketiga, permohonan kepastian investasi dan kepastian hukum atas proyek reklamasi Teluk Benoa, dan permohonan keadilan terutama pengenaan sanksi kepada pihak ketiga yang melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, terkait masalah reklamasi Teluk Benoa Bali, harus mendengarkan pendapat dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

“Yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita adalah, seberapa jauh pihak perusahaan sudah mengakomodir atau sudah mendengar pendapat dari

masyarakat. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa terakomodir dalam pembangunan ini,” ujar Hermanto saat memberikan tanggapannya atas paparan yang telah disampaikan oleh pihak PT. TWBI.

Ia juga mengatakan, sejauh pengamatan yang telah dilakukan oleh Komisi IV DPR RI, ada suatu kepastian dampak lingkungan yang terkait dengan kerusakan lingkungan. Karena disana terdapat sedimentasi, pendangkalan, ada pula terumbu karang, ikan, dan kawasan perumahan rakyat, maka bila dilakukan reklamasi, pastilah ada permukaan laut yang ditutup



Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang memberikan cenderamata kepada Kakanwil Kemenag Sulsel

tidak ada intervensi dan masyarakat melihat badan ini akuntabel.

Sebagian masyarakat, kata Samsu, masih belum percaya terhadap badan ini sehingga lebih cenderung untuk menyalurkan kepada lembaga penampung duafa yang langsung memberikan bukti di lapangan. “Dengan badan pengelola independen kita harapkan seperti itu, dana zakat sampai ke sasaran yang tepat,” ia menambahkan. ■

(mp), Foto: Mastur/br

dengan bahan-bahan material, sehingga mengurangi permukaan laut.

“Kami lebih menyoroti pada persoalan solusi yang komprehensif, bukan solusi yang bersifat parsial. Solusi yang komprehensif ini harus memiliki jaminan, apakah dengan pola yang telah dijelaskan tersebut, ada satu kepastian terhadap nelayan, ikan, dan lain sebagainya akan tetap terjamin keberadaannya. Oleh karenanya, kami meminta jaminan kepastian terhadap dampak lingkungan ini agar bisa selesai,” tandasnya. ■

(dep-mp), Foto: Jayadi/br

Sidang Parlemen Asia ke-9 di Siam Reap Kamboja Resmi Dibuka

Sidang Parlemen Asia atau Asian *Parliamentary Assembly* ke-9 Plenary Session, di Siem Reap, Kamboja, secara resmi dibuka Senin sore (28/11).

Pembukaan Sidang APA yang kali ini mengambil tema "*Promoting Peace and Sustainable Development in Asia*" dihadiri oleh delegasi 25 Parlemen, dari 42 anggota. Sidang berlangsung hingga 2 Desember 2016.

Dalam pembukaan tersebut, delegasi disajikan tontonan berupa tarian tradisional Kamboja.

Setelah itu acara dilanjutkan dengan mendengarkan sejumlah sambutan, diantaranya dari Wakil Ketua Parlemen Kamboja Dr. Nguon Nhel, Sekjen APA Muhammad Reza, Perdana Menteri Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen, Ketua Senat Kerajaan Kamboja Samdech Vibol

Sena Pheakdei SAY Chhum dan terakhir oleh Ketua Parlemen Kerajaan Kamboja yang juga Presiden APA Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei HENG Samrin.

Delegasi Parlemen Indonesia di Sidang APA kali ini di pimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Juliardi P Batubara, serta anggota BKSAP Dave Akbarshah Fikarno dari Fraksi Golkar, Sartono dari Fraksi Demokrat, Jon Erizal dari fraksi PAN, dan M. Arief Suditomo dari Fraksi Hanura.

Sebelum di buka secara resmi, Senin pagi, delegasi parlemen melakukan



Suasana pembukaan sidang Parlemen Asia ke-9 di Siem Reap, Kamboja

pertemuan pada sesi *executive council Meeting* untuk pembahasan agenda sidang. ■

(ut), foto: nitu/hr

Impor Cangkul Harus Dihentikan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menilai kebijakan pemerintah terkait impor cangkul harus dihentikan. Sebaliknya, ia meminta pemerintah mengaktifkan kembali industri kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan cangkul dalam negeri yang mencapai 10 juta unit per tahun.

“ Impor cangkul harus dihentikan. Jika tidak ada keinginan untuk menghentikan itu, maka tidak ada keinginan juga untuk meningkatkan produksi dalam negeri,” ujar Inas dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perindustrian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/11).

Menurut politisi dari F-Hanura itu, selama ini kebutuhan cangkul dalam negeri tidak bisa terpenuhi dikarenakan kekurangan pasokan bahan baku. Sehingga pemerintah perlu



Pimpinan Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perindustrian

memperhatikan ketersediaan bahan baku untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM).

"Ketersediaan bahan bakunya harus diperhatikan, kalau tidak ada bahan

bakunya, bagaimana mau di produksi. Ini bukan persoalan barang murah, tapi barang sederhana kok harus diimpor. Indonesia saja mampu produksi turbin, drone, sedangkan cangkul mesti *import*," tandasnya.

Sementara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan kebutuhan cangkul dalam negeri bisa terpenuhi oleh industri nasional. Pihaknya, juga akan mendorong BUMN terkait untuk segera menghentikan kegiatan impor.

"Prinsipnya, 10 juta cangkul bisa diproduksi dalam negeri dan kita hidupkan lagi industri kecil. Kementerian perindustrian akan mendorong BUMN yang selama ini memiliki izin impor untuk tidak mengimpor, tetapi menjual produk dalam negeri," tegas Airlangga.

Saat ini, Kemenperin sedang menyiapkan skema penugasan kepada tiga BUMN untuk memenuhi kebutuhan cangkul nasional dengan melibatkan IKM. Ketiga BUMN tersebut, yaitu PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). ■

(bs), foto: azka/hr

HUT Korpri ke-45 Menjaga Netralitas ASN

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) harus betul-betul terjaga di tengah semarak kampanye Pilkada serentak. Beberapa wilayah di sekitar DKI Jakarta juga sedang menggelar kampanye pemilihan kepala daerah. Di sinilah pentingnya ASN menjaga jarak dari hiruk pikuk politik.

“Demikian seruan yang disampaikan Inspektur Upacara saat upacara menyambut HUT KORPRI ke-45 di halaman Sekretariat Jenderal DPR RI, Selasa (29/11). Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan MPR, DPR, dan DPD RI hadir mengikuti upacara tersebut dengan tertib.

Di usianya yang ke-45 tahun, KORPRI kian matang. Selain harus menjaga netralitas, organisasi ini juga dituntut mampu menjaga kebhinekaan yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia. KORPRI harus berada di garda terdepan dalam menjaga netralitas dan kebhinekaan. ■

(mb) Foto: Jakarta/hr



Suasana upacara menyambut HUT KORPRI ke-45

Kemen PP & PA Kreatif Tapi Tidak Efektif

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq menilai Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3KB) Kalimantan Barat khususnya dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kreatif namun tidak efektif.

“Kita melihat program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang anggarannya sangat sedikit ternyata mereka sangat kreatif. Membuat berbagai macam program. Tapi itu semua tidak akan efektif karena keterbatasan anggaran, keterbatasan struktur, dan SDM (Sumber Daya Manusia),” ujar Maman saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3KB) Kalimantan Barat, Kamis (17/11).

Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi PKB ini merekomendasikan agar Kementerian yang menjadi mitra kerjanya di Komisi VIII ini dapat melakukan skala

prioritas. Menginventarisir program-program prioritas yang benar-benar menyentuh persoalan yang ada. Tidak hanya sekedar banyak program.

“Membuat program yang sesuai dengan akar persoalan. Sehingga dapat menyelesaikan masalah. Dibanding banyak program tapi tidak dapat dijalankan karena keterbatasan-keterbatasan tadi. Sehingga apa yang menjadi persoalan malah tidak tersentuh. Jadi istilahnya disini *money follow program* atau program yang mengikuti anggaran,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VIII Dapil Kalimantan Barat, Zul Fadhlil yang mengapresiasi program yang disusun Kemen PP & PA terutama BP3KB



Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq

Kalbar. Serta berbagai regulasi yang telah dikeluarkan peraturan daerah oleh Pemprov Kalbar. Sayangnya hal tersebut tidak dapat dijalankan seutuhnya karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan lainnya.

Oleh karenanya, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mendorong agar BP3KB Kalbar dapat ditingkatkan menjadi dinas sehingga memiliki anggaran sendiri yang lebih banyak. Dengan begitu tujuan dan misi pemberdayaan perempuan perlindungan anak dapat terwujud dengan baik. ■

(Ayu), Foto: Ayu/hr

Hadiri Sidang APA ke-9, Delegasi DPR RI Tiba di Siem Reap Kamboja

Delegasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tiba di Siem Reap, Kamboja, Minggu malam (27/11) waktu setempat. Kehadiran para delegasi ini untuk mengikuti Sidang *Asian Parliamentary Assembly* (APA) ke-9 yang kali ini dihadiri 19 Parlemen dari 42 negara anggota.

Delegasi Parlemen Indonesia berjumlah 4 orang, dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Juliari P Batubara (F-PDI Perjuangan), serta Anggota BKSAP Dave Akbarshah Fikarno (F-PG), Sartono (F-PD), dan M. Arief Suditomo (F-Hanura). Kedatangan Delegasi Parlemen Indonesia itu disambut oleh Dubes Indonesia untuk Kamboja Pitono Purnomo.

Acara sidang APA ke-9 sendiri akan dilaksanakan secara resmi mulai Senin (28/11) waktu Kamboja, di *Sokha Siem Reap Resort And Convention Center, Siem Reap*. Sidang direncanakan akan berlangsung hingga 2 Desember 2016.

Menurut salah seorang delegasi DPR RI, Arief Suditomo kepada Parlemen, baginya sidang APA merupakan sebuah forum dimana para anggota parlemen dari negara-negara di Asia melakukan konsolidasi terhadap isu-isu regional dan global.

Karena dalam faktanya, kata Anggota BKSAP DPR RI itu, Indonesia harus banyak mendapatkan dukungan dan kerjasama dengan negara lain, dalam berbagai macam forum-forum internasional, multilateral dan bilateral.

"Misalnya isu tentang pembangunan kembali Gaza. Ada isu tentang hal-hal yang pada dasarnya bisa diadopsi dari bagian-bagian legislasi nasional, misalnya perlindungan data pribadi di internet, dan itu merupakan suatu hal yang ada baiknya juga kita perjuangkan bersama sebagai komitmen regional," terang Arief.



Delegasi DPR RI Arief Suditomo

Lebih lanjut, tambah Arief, forum Sidang APA ini juga merupakan salah satu forum yang sangat ideal untuk melakukan lobi-lobi agar anggota parlemen bisa saling memperkuat,

(APA) merupakan forum antar parlemen di kawasan Asia yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam penyelesaian isu yang menjadi perhatian bersama. ■

mengkonsolidasikan sikapnya, untuk pada akhirnya dibawa ke negara masing-masing dan dijadikan bagian pembentukan kebijakan luar negerinya.

"Dan saya pikir ini merupakan forum yang sangat tepat dan harus bisa diikuti oleh forum-forum internasional lainnya," pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sebagaimana diketahui, Sidang *Asian Parliamentary Assembly*

Delegasi DPR RI Perjuangkan Buruh Migran Tetap Dibahas dalam Sidang APA

Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam Sidang APA di sesi *Executive Council Meeting* meminta serta memperjuangkan agar Sidang APA tetap membahas mengenai buruh migran untuk dimasukkan kedalam agenda rapat.

Hal ini dikarenakan adanya permintaan dari beberapa negara di kawasan teluk untuk men drop pembahasan mengenai hal itu. Anggota delegasi DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dalam rapat menyampaikan, Indonesia mendukung mekanisme yang disarankan oleh Presiden APA untuk membahas mengenai buruh migran atau migrant worker secara khusus di sidang komisi besok.

Ditemui usai rapat kepada Parlemen, Dave menilai bahwa beberapa

Komisi IX Kecewa Pemerintah Belum Siapkan DIM RUU PPLIN

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengatakan pihaknya kecewa kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja RI dan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang tidak menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU PPILN saat diundang rapat komisi IX, Senin (28/11).

“ Kita minta keseriusan dari pemerintah, dalam masa sidang yang akan datang DIM harus sudah diserahkan kepada DPR agar bisa dipelajari dan tentu ini untuk mempermudah pembahasan. Karena kalau seperti ini kami khawatir hasilnya tidak akan maksimal,” ujar Erma



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena

kepada Parlemen di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Senayan, Jakarta.

Komisi IX DPR RI, tegas politisi dari F-PPP ini, memberi waktu penyerahan DIM RUU PPILN sampai tanggal 2 Januari 2017 paling lambat.

"Kita kecewa sekali, kalau sampai tanggal 2 Januari belum selesai Komisi IX akan melakukan konferensi pers dan memberitahu kepada masyarakat bahwa dimana sebetulnya mandeknya UU ini dan DPR sudah amat serius tapi pemerintah belum bisa melakukan koordinasi sesama pemerintah," mantapnya.

Dijelaskan Erma, bahwa titik berat dari RUU PPILN ada di perlindungan mulai dari rekrutmen, penempatan hingga pemulangan TKI.

"Menyangkut semua aspek, karena memang banyak yang harus dibenahi," tuturnya.

Senada dengan Erma,

Anggota Komisi IX Jhon Kenedy Azis mengatakan dirinya menyayangkan tertundanya rapat pembahasan DIM RUU PPLIN hari ini, karena pihak pemerintah yang tidak menyiapkan DIM untuk dibahas.

"Saya sangat menyayangkan bahwa hari ini tertunda lagi, sebenarnya kalau pemerintah menyikap bahwa undangan rapat kita hari ini adalah pembahasan DIM, seharusnya pemerintah menyiapkan DIM untuk dibahas pada rapat," untkapnya.

Sebagaimana diketahui agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan pemerintah hari ini, sedianya akan memulai pembahasan RUU PPILN. Namun, Karena pemerintah belum menyiapkan DIM RUU PPILN, akhirnya rapat pembahasan RUU PPILN ditunda sampai pemerintah menyerahkan DIM kepada Komisi IX DPR RI. ■

negara dikawasan teluk terlihat sekali agar tidak ada pembahasan mengenai migrant worker, karena, jelas Dave, memang mereka tidak menginginkan adanya perlindungan berlebihan terhadap para buruh migran itu.

"Nah ini kan ada banyak juga warga negara kita yang menjadi buruh disana, mereka adalah pahlawan pahlawan devisa, jadi kepastian hidup mereka, keamanan hidup mereka, pendidikan kesehatan mereka juga keluarga yang sudah banyak bermigrasi secara penuh. Nah kita harus pastikan mereka benar-benar terpenuhi hak-hak dasarnya, gajinya, kesehatannya, dipastikan pendidikan anak-anak mereka semua itu harus benar-benar dijamin oleh *house country*. Jadi jangan mereka itu (pekerja migran) istilahnya hanya di

undang kesana hanya untuk diperas tenaga dan pikirannya lalu setelah mereka sudah selesai bila sakit terus dibuang, anak-anaknya tidak diurusin," tegas Dave politisi dari Partai Golkar ini di Siem Reap, Kamboja, Senin (28/11).

Ia menambahkan, jangan hanya demi kepentingan mereka (negara penerima pekerja-red) hanya ingin memakai tenaga nya dan begitu selesai dikembalikan lalu diganti dengan yang baru. "Nah ini yang harus kita perjuangkan," lugasnya.

Delegasi DPR RI dalam sidang APA ke-9 kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Juliari P



Delegasi DPR RI rapat Sidang APA ke-9 di Kamboja

Batubara, serta anggota BKSAP, Dave Akbarshah Fikarno, Sartono, dan M. Arief Suditomo.

APA merupakan forum antar parlemen di kawasan Asia yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam penyelesaian isu yang menjadi perhatian bersama. ■

PT Semen Indonesia Diminta Perbaiki Izin Lingkungan

Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti mengusul agar izin lingkungan PT Semen Indonesia untuk segera diperbaiki agar segera dapat beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Rembang.

Hal itu diungkapkan saat kunjungan kerja spesifik ke Rembang, Jawa Tengah, Sabtu, (26/11).

“ Ia juga meminta agar PT Semen Indonesia ini untuk terus berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan persoalan izin ini yang beberapa waktu lalu digugat di Mahkamah Agung (MA).

"Menurut saya diperbaiki izin itu



Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti

saja. Lalu juga melakukan sinergi dengan Gubernur Jateng Pak Ganjar, karena menginginkan aset negara ini tetap berlanjut," ujar Endang.

Politisi Golkar ini juga menjelaskan diperlukan koordinasi dengan Menteri dan jika diperlukan undang Presiden untuk melakukan tinjauan ke lokasi PT Semen Indonesia untuk memperoleh pertimbangan mengenai keuntungan yang didapat dari PT Semen Indonesia ini.

"Saran saya ini diperlukan koordinasi dengan Bu Menteri. Kalau perlu undang juga Pak Presiden supaya lihat langsung secara fisik. Tentunya nanti juga ada pertimbangan tentang sejauh mana kerugian dan keuntungan yang diterima masyarakat," tuturnya.

Politisi asal Dapil Jateng ini juga menegaskan bahwa keberadaan PT Semen Indonesia ini adalah harapan masyarakat Rembang agar dapat memenuhi kebutuhan lokalnya secara

mandiri. Sehingga ini perlu terus didorong dan mendapatkan dukungan banyak pihak.

"Ini banyak sekali keuntungan untuk masyarakat dan lingkungannya, bahkan ini satu-satunya harapan masyarakat di Jateng untuk memenuhi kebutuhan lokal," harap Endang.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi VI Yaqut Cholil Qoumas, menurutnya cukup diterbitkan saja izin lingkungan yang baru dengan mengakomodir seluruh hasil putusan MA yang memenangkan penggugat. "Jalan saja terus dengan mulai mengajukan izin baru," ujar mantan Wakil Bupati Rembang ini.

Sebagaimana diketahui, MA telah memenangkan upaya peninjauan kembali (PK) gugatan sebagian warga Rembang terhadap pendirian PT Semen Indonesia. Putusan itu dikeluarkan pada Rabu, 5 Oktober 2016. ■

(ib,mp). Foto: Hamdani

Legislator Apresiasi Kesepakatan Aksi Damai 212

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi adanya kesepakatan perihal Aksi Super Damai 2.12 antara Polri, TNI, MUI dan GNPF-MUI.

“ Kami sampaikan apresiasi kepada semua pihak yang bersepakat. Inilah yang kita harapkan selama ini sebagai pengamalan Pancasila dan ajaran Islam yakni musyawarah untuk mufakat," ujar politisi F-Gerindra dalam siaran persnya, Selasa (29/12).

Ditambahkannya, umat Islam itu kata Nabi Muhammad SAW, seperti lebah yang semua tindakannya memberi manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Dan kata KH Zainudin MZ (alm) akan menyengat dengan keras jika dilecehkan dan dilukai .

Dengan demikian, lanjut Sodik, maka aksi tanggal 2 Desember nanti harus lebih damai. Tidak ada lagi isu makar, apalagi adanya upaya adu domba dan konflik antar ulama.

Politisi Dapil Jawa Barat I ini juga berharap, tidak ada lagi pelarangan

pengangkutan demonstran kepada perusahaan angkutan. Dan semua pihak (red: Pendemo, Polri dan TNI) harus kompak menjaga aksi dari pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh dan tidak ikhlas pendemo (umat islam) bersahabat dengan Polri dan TNI.

Selain itu, kata Sodik, proses hukum terkait kasus dugaan penistaan agama jangan diganggu oleh pernyataan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil dan tidak menjunjung tinggi supremasi hukum. Semua orang sama kedudukannya di mata hukum.

"Jangan coba bermain api dan bersikap tidak adil. Polisi dan TNI harus terus menjadi sahabat masyarakat dalam menjaga NKRI dari berbagai upaya yang mengganggu stabilitas dan keutuhan NKRI," tekannya.

Sodik juga mengajak kepada semua pihak,



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid

agar bersikap dengan sangat hikmah dan kebijaksanaan yang tinggi dalam merawat NKRI, sekaligus proses edukasi yg beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ■

(ib,mp). Foto: jkuadr

Legislator Kagumi Pengabdian Guru di Daerah 3T

Hari Guru Nasional yang diperingat setiap 25 November, menjadi momen bagi Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi untuk menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasihnya kepada guru. Menurutnya, setiap orang dapat menjadi sukses, berkat adanya peran dan jasa guru.

“ Tidak ada satupun dari kita yang sukses tanpa sumbangsih dari guru-guru kita. Tidak ada Profesor, tidak ada Presiden, dan tidak ada Anggota DPR RI tanpa bhakti dari para guru,” ujar Dwita, saat dihubungi Parlemen via telepon, Jumat (25/11).

Politisi F-Gerindra itu mengaku sangat kagum dan mengapresiasi dengan pengabdian para guru, terutama mereka yang ditempatkan di daerah pedesaan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

"Mereka mendedikasikan hidupnya untuk masa depan bangsa Indonesia. Terkadang mereka hanya menerima imbalan seadanya, meskipun telah belasan bahkan puluhan tahun mengajar. Kedepannya, saya akan terus mendorong Pemerintah untuk memperhatikan nasib

para guru di daerah," komitmen Dwita.

Dwita juga mengungkapkan bahwa saat ini selain kesejahteraan yang belum memadai, jumlah guru di daerah masih belum terdistribusi dengan baik. Ia menegaskan, permasalahan ini harus segera dituntaskan bersama, karena setiap anak Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

"Sebaik apapun konsep kurikulum, tanpa kehadiran guru di setiap daerah akan sia-sia kurikulumnya, sebab guru lah yang menjadi garis terdepan perbaikan pendidikan," tegas Dwita.

Dwita berkomitmen untuk mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan mitra kerja Komisi X DPR RI untuk bersinergi dengan semua pihak agar permasalahan distribusi guru dapat diatasi.

"Sinergi semua pihak adalah kunci, agar distribusi guru di Indonesia dapat merata," pesan politisi asal dapil Lampung itu. ■



Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi

(sf) Foto: Kresno/hr

Kinerja Perhutani dan Inhutani Membangun Hutan Tidak Signifikan

Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi terhadap paparan yang telah disampaikan oleh Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengenai pembangunan hutan dan juga penggunaan APBN tahun 2016. Terkait masalah pembangunan hutan itu, Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip, meminta penjelasan kepada Kementerian LHK, mengenai kinerja Perhutani dan Inhutani dalam menjalankan tugasnya menjaga hutan.

“ Berkaitan dengan masalah pembangunan hutan kita, dalam konteks kerjasama dengan seluruh *stakeholder* di Kehutanan, yang salah satu diantaranya adalah BUMN Kehutanan yaitu Perhutani dan Inhutani. Perhutani maupun Inhutani yang disertai tugas untuk menjaga hutan kita itu, kinerjanya tidak mengalami kemajuan yang signifikan untuk membangun hutan kita ini. Seolah-olah seperti sia-sia saja tugas dan mandat yang diberikan oleh pemerintah,” ujar I Made urip saat RDP Komisi IV DPR RI dengan pejabat Eselon I KLHK, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).

Made menilai, Perhutani dan Inhutani tidak mampu menjaga kelestarian hutan

dan lahan. Oleh karenanya ia mempertanyakan, sejauh mana Kementerian LHK dalam melakukan sinergitas untuk menjaga seluruh hutan kita agar tetap lestari.

"Khusus di wilayah Kalimantan Tengah, sekian juta hutan kita yang masih lestari, tergerus untuk pembangunan perkebunan. Masih banyak persoalan-persoalan yang muncul disana, salah satu diantaranya adalah banyak pengusaha-pengusaha perkebunan yang menggunakan hutan lindung yang tidak memiliki ijin," tegasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa daftar nama perusahaan-perusahaan tersebut saat ini sudah ada di tangan Komisi IV DPR RI, dan Anggota Dewan telah melakukan

kunjungan kerja dan kunjungan spesifik ke wilayah tersebut. ■



Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip

(dep.mp) Foto: Naeftoroji/hr

Komisi VI Beri Dukungan Politik Terhadap PT SI

Komisi VI DPR RI memberikan dukungan politik terhadap PT. Semen Indonesia, karena instansi BUMN ini sudah sangat besar dan menjaga agar kepentingan investor tidak terganggu. Hal itu dikatakan Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno ketika memimpin Kunjungan Spesifik Komisi VI ke Tuban, Sabtu (26/11) lalu.

“ Yang patut disyukuri bahwa keputusan MA tidak melarang Semen Indonesia di Rembang itu tetap berproduksi,” lanjut Teguh. Kemudian dia mengatakan bahwa Komisi VI akan mendorong Semen Indonesia agar melakukan upaya hukum atau perlawanan hukum yang semaksimal mungkin agar bisa menang dimata MA, sehingga tidak ada lagi kelemahan dari Semen Indonesia di Rembang untuk beroperasi ke depannya.

“Kalau melihat hal ini secara objektif sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran apabila pabrik di Rembang bekerja kemudian nanti akan merusak lingkungan. Memang kemudian ada pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan, yaitu bagaimana pengalaman terbaik kondisi di sini (Tuban) dibawa kesana (Rembang), diadopsi kesana, ke masyarakat di sekitar, terutama LSM, NGO, maupun masyarakat sekitar yang mungkin masih melakukan penolakan agar melihat langsung kondisi di sini,” ungkap Teguh kepada pers.

Politisi PAN Dapil Jateng ini berpendapat, pendekatan ke masyarakat

itu sudah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh korporasi, tapi yang harus diingat, kekurangan dalam melakukan pendekatan ini masih bisa dilakukan perbaikan. Misalnya pendekatan secara khusus apakah melalui tokoh masyarakat, melalui kyai, ulama yang ada disitu, termasuk membawa masyarakat di situ untuk melihat contoh apa yang sudah dilakukan di Tuban.

“Ini hal lain yang perlu sekali dilakukan sehingga masyarakat di situ akan objektif melihat. Kita sendiri yang tadinya skeptis melihat yang namanya pabrik semen itu melakukan eksploitasi tanah ternyata selain memanfaatkan hasil tanahnya untuk semen, ternyata pasca eksploitasinya masih bisa juga dimanfaatkan,” lanjutnya.

Ditambahkan Teguh, meskipun putusan MA adalah PK yang itu istilahnya adalah keputusan terakhir, namun dia mendorong agar Semen Indonesia tetap meminta perlindungan hukum kepada MA. MA itu adalah Lembaga Negara,



Tim Kunspek Komisi VI DPR RI berkunjung ke PT Semen Indonesia di Tuban

Lembaga Yudikatif yang menegakkan supremasi hukum, yang diharapkan dapat memberikan keadilan yang paripurna.

“Jadi ini tetap perlu dilakukan, Semen Indonesia harus tetap meminta perlindungan hukum misalkan dengan cara PK diatas PK. Kita sendiri tentu Komisi VI sebagai mitra dari BUMN, akan memberikan dukungan secara politis, terhadap perjuangan agar operasional pabrik Rembang ini tetap berjalan normal sesuai dengan perencanaan korporasi Semen Indonesia,” ujar Teguh Juwarno menambahkan. ■

Foto: Kresna/br

Perlu Koordinasi Antar Organisasi Profesi Bangun Pendidikan

Panitia Kerja Sarana dan prasarana (Panja Sarpras) Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI meminta data yang valid dan riil terkait sekolah yang tidak layak, rusak dan rusak parah serta sekolah yang kekurangan fasilitas kepada Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) untuk bahan rekomendasi kepada pemerintah.

“ Kami meminta kepada FSGI dan IGI untuk memberikan data yang valid dan riil berkaitan dengan Sarpras berdasarkan temuan di lapangan. Memang perlu koordinasi antara organisasi profesi untuk bersinergi membangun pendidikan,” kata Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri usai rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Dalam rapat, lanjut Fikri, FSGI dan IGI juga menjelaskan ada beberapa permasalahan dan hambatan yang disampaikan. Salah satunya adalah masih banyaknya ruang dan gedung Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi rusak dan tidak memiliki perpustakaan. Masih terdapat kekurangan Sarpras ekstrakurikuler.

“Mereka menduga masih banyaknya sekolah yang rusak karena adanya oknum berkepentingan di dalam. Yang seperti ini perlu dicari tahu sebagai rekomendasi kepada pemerintah agar tidak ada lagi sekolah yang tidak layak di tahun 2017,” tambahnya.

Lebih lanjut mereka menjelaskan, sebagian besar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak memiliki

Indonesia Potensial Capai Swasembada Beras dan Garam

Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, Indonesia belum menghasilkan satupun komoditas pangan yang membanggakan secara institusi negara. Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, mencermati produk pangan dalam negeri yang hingga kini belum mencapai swasembada.

“Beras dan garam sangat potensial bagi Indonesia untuk mencapai swasembada, karena negara ini sangat subur dan dalam sejarahnya pernah mencapai swasembada beras. Bentangan pantai wilayah Indonesia merupakan yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada,” ucap Akmal dalam rilisnya (29/11).

Ia juga mengatakan, harga beras Indonesia pernah menjadi yang termahal di dunia pada tahun ini. Keadaan tersebut menjadikan negara-negara produsen beras dari luar, merasa sangat tergiur untuk memasukkan berasnya ke Indonesia. Bulan Februari 2016, harga beras Indonesia mampu mencapai dua kali lipat harga beras Thailand, Vietnam dan India. Harga beras di negara-negara itu dapat mencapai Rp. 6.000,- per kilogram. Sedangkan di Indonesia rata-rata sudah Rp. 12.000,- per kilogram.

"Padahal Indonesia merupakan negara produsen beras yang memiliki luasan lahan yang cukup, hanya saja sistem produksinya yang masih tertinggal.

bengkel produktif sehingga hanya mengandalkan teori dan magang di dunia usaha industri saja, belum lagi Sarpras yang tidak mengikuti perkembangan teknologi dan rasio peralatan dan mesin tidak sebanding dengan jumlah siswa.

"Ini perlu ditingkatkan, bagaimana negara ini mau menghasilkan siswa yang bisa langsung bekerja kalau peralatan di sekolahnya saja tidak mendukung," ungkapnya.

Politisi F-PKS itu mengatakan dari permasalahan yang didengar pihaknya membuat rekomendasi untuk diberikan kepada pemerintah saat rapat kerja. Salah satunya perlu adanya penambahan laboratorium bagi satuan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi

Penggilingan padi yang kurang efisien hingga rantai distribusi yang buruk, membuat negara ini banyak tertinggal," tandasnya.

Menurut Akmal, regulasi sistem perberasan didalam negeri masih sangat buruk. Hal ini terlihat jelas dari masalah kesejahteraan petani padi, yang tidak kunjung berubah menjadi lebih baik. Bahkan lebih setengah penduduk miskin Indonesia didominasi petani. Fakta buruknya regulasi perberasan Indonesia juga terlihat ketika pemerintah menyatakan produksi surplus, namun kenyataan dilapangan, di pasar-pasar, menunjukkan harga beras naik.

"Selama ini komoditas beras hanya memberikan keuntungan sangat besar pada segelintir pihak. Petani tetap tidak berdaya. Pemerintah harus mulai mengubah paradigma sistem perberasan nasional. Karena jika regulasi beras ini baik, saya yakin swasembada beras bukan sebuah mimpi, tapi akan segera menjadi kenyataan," tegas Akmal.

Dia yakin bahwa bila swasembada

Kemudian, perlu pemetaan dan target bagi bantuan Sarpras oleh pemerintah agar dapat dijalankan secara berkeadilan berdasarkan data valid dan riil. Perlu adanya program percepatan dalam mengatasi sekolah yang rusak, khususnya sekolah rusak berat.

Komisi X juga menekankan perlu koordinasi dengan pimpinan daerah agar pembangunan pendidikan terus ditingkatkan secara selaras antar visi pendidikan nasional dan otonomi daerah. Perlu adanya regulasi agar pembangunan pendidikan khususnya swasta dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada diskriminasi.■

beras dan garam mampu dicapai pemerintah, maka hal ini akan dikenang dalam sejarah sebagai prestasi besar pemerintah sekarang. Karena efek rantai swasembada ini akan mampu mengurangi kemiskinan, sekaligus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Sehingga pada kompetisi masa depan dengan negara luar, Indonesia akan lebih siap menghadapinya.■



Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri

BURT Apresiasi RS Pertamina Balikpapan Layani Anggota DPR RI

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta mengapresiasi kesiapan Rumah Sakit Pertamina Balikpapan dalam melayani Anggota DPR RI beserta keluarganya, jika harus dirawat atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Ia tak meragukan RSPB, mengingat fasilitasnya pun sudah cukup memadai.

Demikian dikatakannya usai meninjau fasilitas RSPB di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (28/11). Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua BURT Elva Hartati (F-PDI Perjuangan, dapil Bengkulu) itu langsung disambut Direktur RSPB, Syamsul Bahri, dan pendampingan dari PT. Jasindo, sebagai *provider* asuransi DPR RI.

"Kami apresiasi kesiapan dari RSPB ini. Saya sendiri tahu bahwa RSPB di Jakarta, merupakan rujukan RS untuk Kepresidenan, jadi seharusnya bahwa RSPB juga sudah tahu apa yang harus dilakukan jika ada Anggota Dewan maupun keluarganya yang datang untuk berobat," kata politisi yang akrab dipanggil Ichi ini.

Politisi F-PG itu menilai, fasilitas dan Sumber Daya Manusia RSPB sudah cukup memadai. Ia juga mengapresiasi koordinasi antara RSPB dengan PT. Jasindo. Ia meminta koordinasi itu terus ditingkatkan.

Kendati mengapresiasi, politisi asal dapil Sulsel itu menambahkan, ia tetap harus mendapat pengalaman atau laporan dari Anggota DPR RI yang pernah dirawat atau yang mendapat pelayanan kesehatan di RSPB. Sehingga, informasi yang didapatkan

dalam kunjungan ini, semakin valid.

"Kami juga harus mendengar laporan langsung dari Anggota Dewan yang sudah mendapat pelayanan. Jangan sampai hanya di bibir saja bahwa ketika Anggota Dewan datang untuk mendapatkan pelayanan, justru tidak mendapatkan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Direktur RSPB dan PT. Jasindo," tegas Ichi.

Sebelumnya Direktur RSPB Syamsul Bahri menjelaskan bahwa pihaknya sudah memiliki fasilitas khusus untuk Anggota DPR RI, keluarganya, termasuk dalam hal ini untuk pejabat negara. Diantaranya ruang rawat *Suite Business, Suite Commerce*, hingga ICCU dan NICU.

"RSPB beserta seluruh SDM siap untuk memberikan pelayanan kepada seluruh Anggota DPR RI beserta keluarganya, jika dibutuhkan pelayanan dengan kami. Koordinasi dengan PT. Jasindo juga sudah berjalan dengan baik," jelas Direktur RSPB.

Kunker BURT ke Kaltim juga diikuti oleh Ketua BURT Roem Kono (F-PG, dapil Gorontalo), Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso (F-PD, dapil Jabar), dan Wakil Ketua BURT Novita

Wijayanti (F-Gerindra/dapil Jateng).

Kemudian Bakri (F-PAN, dapil Jambi), Anton Sukartono Suratno (F-PD, dapil Jabar), Agus Sulistiyono (F-PKB, dapil DI Yogyakarta), dan Anshory Siregar (F-PKS, dapil Sumut).

Berikutnya Hasrul Azwar (F-PPP, dapil Sumut), dari F-PDI Perjuangan ada Yulian Gunhar (dapil Sumsel) dan Ribka Tjiptaning (dapil Jabar), Sri Meliyana (F-Gerindra, dapil Sumsel), Joko Purwanto (F-PPP, dapil Jabar), Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem, dapil Sumsel), dan Muhammad Farid Al Fauzi (F-Hanura, dapil Jatim). ■

(6/1. Foto: Sofyan/br.



Anggota BURT DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta

KPAI Mendatang Diharapkan Tampilkan Wajah Baru Profesional dan Kredibel

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim mengharapkan 18 calon komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang akan diajukan ke DPR RI untuk *fit and proper test* betul-betul mempunyai kapasitas, kredibilitas, pengalaman dan profesionalisme sehingga bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Diharapkan Desember ini Dewan ini bisa merekomendasikan 9 calon KPAI sebagai pengganti KPAI yang berakhir tahun ini.

Hal itu dikatakannya kepada pers Selasa (29/11) berkaitan akan berakhirnya masa tugas KPAI tahun ini. Dari 9 calon komisioner masih ada 4-5 anggota KPAI periode ini yang memiliki masa bakti kedua. "Kalau toh ikut lagi bisa diseleksi, *track record incumbent* tetap jadi bagian penilaian sebelum *proper*



Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim

test di DPR RI," terang dia.

Politisi PPP ini juga berharap, KPAI ke depan, mampu menangkap kejadian eksternal bahkan kalau perlu dipertajam, diimbangi *right and obligation* masing-masing komisioner dalam peran di ruang publik serta penegakan etika internal sehingga tidak terjadi *overlap*.

"Dengan tiga hal ini, saya yakin ke depan KPAI akan mampu menampilkan wajah baru yang jauh berintegrasi, lebih holistik dan mampu memberi warna dalam penegakan keadilan bagi proses tumbuh kembangnya anak-anak calon generasi bangsa ke depan," tandasnya.

Mencermati kinerja KPAI sekarang ini, ia menilai telah mengerjakan porsi yang luar biasa karena mampu mencoba mengkomunikasikan kejadian-kejadian yang sangat ekstrem di lapangan baik kasus JIS dan berbagai kasus *trafficking*. Peran KPAI dinilai telah memberikan warna yang cukup berbeda bagi penyelamatan anak.

Meski demikian Mustaqim mengingatkan, sesuai UU 35/2014 bahwa yang dimaksud anak s/d usia 18 tahun, siapapun harus sadar bahwa generasi muda kita usianya sampai 18. Akibatnya lupa pada anak-anak SMP yang kisaran usianya 12 tahun bahkan lebih fokus pada anak usia SD dan TK. "Karena itu, di sinilah Komisi VIII memiliki konsen pada persiapan pergantian masa tugas KPAI yang akan datang," terang politisi PPP dari Dapil Jateng ini.

Sampai saat ini Pemerintah telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) mencari dua kali lipat dari jumlah 9 komisioner KPAI. Dengan anggota Pansel yang kredibel diharapkan akan memunculkan calon-calon komisioner yang memiliki kredibilitas bagus dan memiliki kemampuan serta pengalaman teknis yang cukup dan bisa membawa marwah KPAI lebih baik lagi. ■

(mp), Foto: Azka/br

Komisi III Terima Pengaduan Beberapa Kantor Pengacara

Komisi III DPR RI menerima pengaduan dari beberapa Kantor pengacara terkait kinerja dari lembaga hukum yang menjadi mitra kerja Komisi III.

“ Kami (Komisi III) menerima pengaduan yang berkaitan dengan kinerja dari lembaga hukum yang menjadi mitra kerja Komisi III. Jadi tidak membicarakan perkara atau kasusnya,” tegas Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa.

Aduan pertama datang dari kantor pengacara Bambang and Partner (BNP) yang mengadukan kinerja dari Kabareskrim dan Kejaksaan. Palsanya pihaknya atas nama kliennya PT Bumigas Energi pada November 2012 melaporkan Mantan Dirut PT Geo Dipa Energy, Syamsudin Warsa ke Bareskrim Polda Metro Jaya atas dugaan tindakan penipuan.

Baru pada 1 September 2016 berkas laporan tersebut dinyatakan P21 atau lengkap oleh kejaksaan. Berkas dikirim oleh penyidik ke Kejaksaan negeri Jakarta Selatan atau Tahap 2 pada 25 Oktober 2016. Saat tahap 2 itu Syamsudin dikenakan tahanan kota.

"Sayangnya setelah tahap 2 sampai hari ini berkas belum dikirim ke Pengadilan Negeri. Padahal menurut hukum acara pidana atau KUHP pasal 139, 140 dan 143 berkas setelah dinyatakan lengkap harus dikirim ke pengadilan. Di sini kami melihat ada permainan berkas di tubuh Bareskrim maupun Kejaksaan," ungkap Bambang, pengacara dari BNP.

Ditambahkan Bambang, pada 28 November 2016 kemarin, pihaknya malah mendengar kabar bahwa Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas), Widyo Pramono akan menghentikan perkara itu karena dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk disidangkan. Terkait hal itu maka Bambang mempertanyakan mekanisme beracara dari acara hukum pidana. Ia berharap agar kasus ini ada kejelasannya alias tidak digantung-gantung.

Sementara itu kantor pengacara Dede Nasution memohon perlindungan hukum bagi kliennya, Siti Maryam Ibrahim selaku pengurus sah dari yayasan Teungku Fakinah. Hal itu berdasarkan keputusan dari Sekjen DPR RI.

Terkait pengaduan dan laporan dari beberapa kantor penasehat hukum tersebut, Politisi dari Fraksi Gerindra ini berjanji akan mempertanyakannya kepada mitra kerjanya, yakni Kejaksaan dan Bareskrim. Hal ini semata demi tegaknya hukum. ■

(Ayu), Foto: Rumi/br



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa

RS Pertamina Balikpapan Siap Layani Anggota DPR RI dan Keluarganya

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Elva Hartati mengatakan, Rumah Sakit Pertamina Balikpapan (RSPB) di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sudah siap melayani Anggota DPR RI beserta Anggota Keluarganya, jika harus mendapat perawatan atau pelayanan kesehatan.

“Demikian dikatakannya saat memimpin kunjungan kerja BURT ke Balikpapan, Kaltim, Senin (28/11). Kunjungan yang didampingi PT. Jasindo sebagai *provider* asuransi DPR RI ini, langsung diterima oleh Direktur RSPB, Syamsul Bahri.

"Setelah mendengar penjelasan dari Direktur RSPB, dan meninjau fasilitasnya, saya rasa cukup bagus untuk merawat Anggota DPR RI beserta keluarganya di Kaltim, jika mengalami sakit dan harus mendapat perawatan," kata Elva, usai pertemuan dengan Direksi RSPB.

Politisi F-PDI Perjuangan itu menambahkan, dari sisi fasilitas maupun Sumber Daya Manusia, RSPB ini sudah cukup baik. Sehingga dapat dikatakan layak untuk merawat Anggota DPR RI beserta keluarganya. Namun, ia mengingatkan, pelayanan juga harus terus ditingkatkan.

"Ke depannya, saya mohon kepada Direksi RSPB apabila masih ada kekurangan, untuk segera dilengkapi, dan saya mohon untuk fasilitas dan SDM, ditingkatkan lagi, dan lebih baik lagi. Saya mohon juga, agar pasien yang merupakan Anggota DPR RI beserta anggota keluarganya, apabila mereka sakit, mereka dilayani sesuai dengan anjuran Pemerintah," pesan Elva.

Politisi asal dapil Bengkulu ini juga meminta kepada Direksi RSPB untuk selalu berkoordinasi dengan PT. Jasindo, sebagai *provider* asuransi DPR RI. Terutama untuk pembaruan



Tim Kunker BURT DPR RI meninjau RS Pertamina Balikpapan

nama-nama Anggota DPR RI.

"Banyak di daerah lain yang belum sempurna seperti RSPB ini. Kalau belum sempurna, kami akan memberitahu pihak rumah sakit, agar dipenuhi fasilitas yang belum dilengkapi, sehingga sudah sesuai dengan kriteria atau standar pelayanan untuk Anggota Dewan beserta keluarganya," imbuh Elva, yang juga Anggota Komisi IX DPR RI itu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota BURT Bakri. Politisi F-PAN itu melihat, fasilitas di RSPB sudah cukup memadai dan memenuhi syarat. Bahkan menurutnya, RSPB ini dapat dijadikan contoh bagi RS lain dalam hal pelayanan kepada Anggota DPR RI beserta keluarganya.

"Saya pikir juga RS lain dapat menjadikan RSPB sebagai contoh pelayanan. Kami berharap tindakan-tindakan yang sifatnya harus cepat, betul-betul dilakukan. Jangan sampai proses administrasi berjalan, pasien tidak ditangani," kata politisi asal dapil Jambi itu.

Sebelumnya Direktur RSPB

Syamsul Bahri menjelaskan bahwa pihaknya sudah memiliki fasilitas khusus untuk Anggota DPR RI, keluarganya, termasuk dalam hal ini untuk pejabat negara. Diantaranya ruang rawat *Suite Business, Suite Commerce*, hingga ICCU dan NICU.

"RSPB beserta seluruh SDM siap untuk memberikan pelayanan kepada seluruh Anggota DPR RI beserta keluarganya, jika dibutuhkan pelayanan dari kami. Koordinasi dengan PT. Jasindo juga sudah berjalan dengan baik," jelas Direktur RSPB.

Sebagaimana diketahui, kunker BURT ke Kaltim dalam rangka pengawasan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta anggota keluarganya ini juga diikuti oleh Ketua BURT Roem Kono (F-PG, dapil Gorontalo), Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso (F-PD, dapil Jabar), dan Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti (F-Gerindra/dapil Jateng).

Kemudian Anggota BURT Andi Fauziah Pujiwati Hatta (F-PG, dapil Sulsel), Anton Sukartono Suratno (F-PD, dapil Jabar), Agus Sulistiyono (F-PKB, dapil DI Yogyakarta), dan Anshory Siregar (F-PKS, dapil Sumut).

Berikutnya Hasrul Azwar (F-PPP, dapil Sumut), dari F-PDI Perjuangan ada Yulian Gunhar (dapil Sumsel) dan Ribka Tjiptaning (dapil Jabar), Sri Meliyana (F-Gerindra, dapil Sumsel), Joko Purwanto (F-PPP, dapil Jabar), Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem, dapil Sumsel), dan Muhammad Farid Al Fauzi (F-Hanura, dapil Jateng). ■

(F) foto: srgyan/br



Tim Kunspek Komisi X DPR RI kunjungi ke UPTD SKOI Dispora Kaltim

Kaltim Aplikasikan UU SKN Sesuai Harapan

Anggota Komisi X DPR RI Yayuk Basuki menilai, penerapan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Tahun 2005 di Provinsi Kalimantan Timur cukup baik, dan bahkan dia melihatnya salah satu yang terbaik untuk di luar Pulau Jawa setelah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) karena Palembang punya arena sendiri.

Hal itu diungkapkannya kepada Parlemen usai meninjau PPLP/SKOI dan Stadion Utama Palaran, Samarinda, Jum'at (25/11) lalu.

Menurut politisi Partai PAN ini, Pemprov Kaltim melalui Dispora memiliki komitmen yang kuat terhadap penyelenggaraan olahraga pendidikan. Dan saat ini, Dispora Pemprov Kaltim memiliki dua wadah dalam melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet pelajar berprestasi. Yakni, Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Kaltim yang anggarannya murni dari APBD. Kemudian, Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) yang anggarannya berasal dari APBN.

Disini kita lihat, lanjut dia, memang ada beberapa yang perlu dibantu oleh pemerintah pusat, bahwa setiap tahun justru anggaran itu makin menurun untuk bantuan PPLPnya. Sebetulnya tidak boleh seperti itu karena bagaimanapun mereka sudah menerapkan UU SKN Tahun 2005 dengan baik disini

dengan memakai alokasi anggaran APBD sendiri. "Sebetulnya melalui pemerintah pusat atau Kemenpora harusnya bisa itu bersinergi yang akhirnya ada gayung bersambut," terang Yayuk.


Wakil Ketua Komisi X, Sutan Adil Hendra (SAH) mengatakan hal senada, bahwa penerapan UU SKN Tahun 2005 di Kaltim sudah cukup bagus. Artinya, mereka bisa menguraikan itu sehingga mereka satu sama lain bisa membuka cabang-cabang olahraga (cabor) dan bisa menjadi sesuatu prestasi yang luar biasa. "Jadi UU SKN Tahun 2005 di Kaltim ini betul-betul mereka aplikasikan sesuai dengan harapan kita," ungkapnya.

Terkait dengan APBN untuk PPLP, politisi asal Dapil Jambi mengatakan APBN belum sepenuhnya hadir di daerah ini. Oleh karenanya akan didorong Kemenpora bagaimana dapat memberikan tambahan anggaran sebagaimana mereka inginkan. ■

(ru) Foto: Jastu/br

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344

 @dpr_ri

 DPR RI

 @DPR_RI

 DPR RI



Pertemuan Tim Pemantau Pelaksanaan UU Otonomi Khusus di Yogyakarta dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon dengan Gubernur DI Yogyakarta dan Sekda Kabupaten Kulon Progo. Selasa (22/11) Foto: Hamdis/hr

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Ferdiansyah dengan Menristek-dikti M. Nasir. (Selasa (29/11) Foto: Eno/hr



Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. Kamis (1/12) Foto: Jaka/hr